

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Peneliti menganalisis tentang pengaruh NPL, FDR dan BI Rate terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2019. Sedangkan objek yang akan diteliti oleh penulis yaitu Bank Swasta non Devisa yang terdaftar di BEI. Data Statistik laporan keuangan yang dipergunakan adalah laporan keuangan tahunan perbankan yang sudah dipublikasikan pada website yang resmi oleh masing-masing BUK maupun BUS pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Penulis menggunakan model regresi linier berganda pada penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik purposive sampling, sehingga untuk sampel yang dipakai pada penelitian ini sebanyak 17 Bank Swasta Non Devisa adapun nama-nama bank yang terdaftar yaitu :

1. PT. Bank MAYORA (MYOR)

Bank MAYORA mendapatkan izin usaha Bank Umum sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 719/KMK.017/1993 tanggal 14 Juli 1993 dan menjadi Bank Umum Devisa di tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Gubernur BI No. 15/5/KEP.DPG/2013 tanggal 7 Mei 2013. Bank MAYORA Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank MAYORA berdiri sebagai perusahaan perbankan pada 28 Juli 1993. Dalam perjalanannya, Bank MAYORA mengalami proses siklus pasang-surut yang semakin menguatkan keberadaannya di industri perbankan Indonesia. Ujian terberat yang dialami Bank MAYORA dan seluruh perbankan Indonesia adalah krisis moneter di tahun 1997-1998. Sejumlah Bank berguguran di masa itu, sementara Bank MAYORA sanggup bertahan sebagai salah satu Bank yang sehat dan tidak memerlukan rekapitalisasi. Keberhasilan untuk bertahan adalah karena Bank MAYORA adalah Bank yang mengelola usaha berdasarkan prinsip tata kelola

perusahaan yang baik yang selalu menganut prinsip Profesionalisme, Transparansi, Tanggung jawab, Akuntabilitas dan Kewajaran.

Proses transformasi Bank MAYORA terus berlanjut dari tahun ke tahun dengan membangun pondasi pertumbuhan yang lebih kokoh dalam berbagai aspek baik perkreditan, pelayanan jasa, teknologi informasi, sumber daya manusia, manajemen risiko maupun infrastruktur. Untuk menjadi Bank pilihan di bidang ritel dan konsumen, Bank MAYORA berupaya senantiasa memenuhi kebutuhan nasabah melalui berbagai produk (*lending*) dan simpanan (*funding*) yang berkualitas dan menarik. Produk pinjaman yang dimiliki Bank MAYORA antara lain KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), KMG (Kredit Multi Guna), KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), PRK (Pinjaman Rekening Koran), PB (Pinjaman Berjangka) dan berbagai produk lainnya.

2. PT. Bank Multi Arta Sentosa (MAS)

BANK MAS didirikan berdasarkan Akta Notaris H.Saidus Sjihar, SH Nomor 201 tanggal 28 Juli 1992 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-6998.HT.01.01.Th92 tanggal 25 Agustus 1992.

Kantor Pusat BANK MAS berkedudukan di Grha Bank MAS, Jalan Setiabudi Selatan Kav. 7-8, Kuningan, Jakarta Selatan, memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum Non Devisa melalui surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1093/KMK/017/1992 tanggal 15 Oktober 1992 dan ijin usaha Perdagangan Valuta Asing melalui Surat Keputusan Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia Nomor 5/4/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003

Akhir tahun 2013 pemegang saham melakukan setoran modal sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah). Jumlah modal disetor Bank MAS akhir tahun 2014 menjadi Rp. 1.055 Milyar dan sudah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat OJK No. S31/PB.333/2014 tanggal 20 Mei 2014 dan sesuai PBI No. 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan

Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank maka Bank MAS dikelompokkan dalam BUKU 2(dua).

3. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)

Bank BTPN (secara resmi dikenal sebagai Bank Tabungan Pensiunan Nasional hingga 31 Januari 2019) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, yang berdiri sejak 1958, dan berkantor pusat di Jakarta (sebelumnya di Bandung). Bank ini berstatus Bank Devisa.

Bank BTPN yang awalnya merupakan singkatan dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional ini terlahir dari pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 1958 di Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "BAPEMIL") dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat rentenir.

Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status Bank BTPN tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status Perseroan sebagai Bank Umum.

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Bank BTPN memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada Nasabah, baik

simpanan maupun pinjaman. Namun aktivitas utama Bank BTPN adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market Bank BTPN adalah para pensiunan.

4. PT. Bank Yudha Bhakti (BBYB)

Bank Yudha Bhakti adalah salah satu perusahaan publik yang bergerak dalam bidang perbankan dan memiliki kantor pusat di Jakarta. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1989 dan sebelumnya dikuasai oleh grup Gozco bersama dengan sejumlah induk koperasi di lingkungan TNI.

Bank ini mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 9 Januari 1990. Sejak tahun 2001, Bank yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Induk Koperasi dan Pusat Koperasi di Lingkungan TNI/POLRI serta Dephankam, kini mampu melakukan ekspansi secara berkelanjutan dengan membuka kantor cabang di wilayah Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Kebutuhan penguatan modal dan masuknya investor swasta membuat bank ini memiliki 3 pemilik saham terbesar yaitu PT Akulaku Silvr Indonesia sebesar 24,08%, PT Gozco Capital sebesar 21,76% dan PT ASABRI (Persero) memiliki saham sebesar 20,13%.

5. PT. Bank Victoria International Tbk (BVIC)

PT Bank Victoria International Tbk (selanjutnya disebut Bank Victoria atau Bank) pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan notaris Amrul Partomuan Pohan SH, LLM. Nama Bank Victoria kemudian berubah menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 pada tanggal 8 Juni 1993. Akta perubahan nama tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan C2-4903. HT.01.01.Th.93 tertanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 342/Leg/1993 pada tanggal 29 Juni

1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 dan Tambahan No. 2602.

Bank Victoria secara komersial memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 5 Oktober 1994 setelah memperoleh izin usaha sebagai bank umum pada tanggal 10 Agustus 1994. Pada tahun 1997, Bank Victoria memperluas portofolio layanan dengan memperdagangkan valuta asing setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Izin No. 029/126/UOPM pada tanggal 25 Maret 1997 yang telah diperpanjang melalui Surat No. 5/6/KEP.DIR.PIP/2003 pada tanggal 24 Desember 2003, serta telah memperoleh pernyataan pencatatan pendaftaran ulang dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008.

Pada tahun 1999, Bank Victoria telah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta, sejak saat itu Bank Victoria aktif melaksanakan berbagai aksi korporasi seperti Penawaran Umum Terbatas dan menerbitkan Obligasi. Di tahun 2007, Bank menerbitkan Obligasi II dan Obligasi Subordinasi I, masing-masing bernilai Rp. 200 Miliar. Kemudian di tahun 2008, Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD) IV senilai Rp. 116,75 Miliar.

6. PT. Bank Nationalnobu (NOBU)

PT Bank Nationalnobu Tbk (NobuBank) adalah bank yang telah berdiri lebih dari 20 tahun di industri perbankan Indonesia yang kini hadir dengan konsep dan tampilan yang baru sebagai wujud dari diperbaruinya visi, misi dan strategi Perseroan. Dengan semangat untuk lebih mampu memberikan kontribusi riil pada perekonomian di tanah air, NobuBank berusaha menciptakan nilai tambah bagi masyarakat luas melalui jasa intermediasi perbankan yang menjadi kompetensi inti yang dimiliki Perseroan. Melalui langkah-langkah strategis yang dilakukan, Perseroan ingin mempertajam kompetensi tersebut khususnya dalam bidang commercial dan consumer banking dengan memilih segmentasi pasar pada usaha kecil dan menengah yang terbukti telah menjadi fondasi yang kuat dalam

perekonomian Indonesia. Dengan integritas yang tinggi, Perseroan ingin memperkuat dan memperluas jaringan kemitraan melalui pelayanan yang prima dan pembukaan kantor cabang di berbagai lokasi strategis di seluruh wilayah Indonesia. Di masa datang, kepercayaan dari nasabah dan mitra bisnis akan mampu membawa Perseroan pada posisi terhormat di dalam dunia perbankan khususnya dalam hal asset, pangsa pasar, dan keluasan jaringan, tidak hanya dalam perspektif lokal namun juga dari sudut pandang regional dan global. Dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan, maka Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan pada tanggal 20 Mei 2013 secara resmi telah mencatatkan diri di Bursa efek Indonesia dengan kode saham “NOBU”. Hal ini sekaligus menjadi momentum bagi Perseroan untuk mengajak masyarakat luas turut berpartisipasi dalam pengembangan Perseroan di masa datang.

7. PT. Bank Fama Internasional (FAMA)

Bank Fama berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, didirikan pada tanggal 05 Maret 1993 dan mulai beroperasi pada tanggal 01 November 1993 sebagai Bank Umum dengan modal disetor berjumlah Rp 10 Milyar. Setelah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir tanggal 07 Desember 2007 modal disetor menjadi Rp 65.5 milyar.

Sejalan dengan visi Bank yaitu ”menjadi Bank ritel yang tumbuh dengan kokoh, sehat dan terpercaya”, Bank Fama selalu berusaha untuk tumbuh sehat dengan berpegangan pada prinsip kehati-hatian, dan terbukti pada saat krisis ekonomi, Bank Fama menjadi salah satu bank yang tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan pemerintah.

Saat ini kami memiliki beberapa jaringan kantor secara online di Kota Bandung, Jakarta, dan Tangerang. Pelayanan kami fokus pada kebutuhan nasabah retail khususnya Usaha Kecil Menengah (“UKM”).

Kami akan terus mempertahankan predikat “Sangat Bagus” dalam Kinerja Keuangan yang diberikan oleh InfoBank Awards dan bertumbuh tanpa batasan.

8. PT. Bank Harda Internasional (BBHI)

Berawal dengan dibentuknya Badan Hukum PT. Bank Arta Griya Tanggal 21 Oktober 1992, kemudian berubah nama pada tanggal 16 Januari 1993 menjadi PT. Bank Harda Griya yang dikenal dengan sebutan BANK HARDA, dan resmi beroperasi pada tanggal 10 Oktober 1994 di Jl. Pinangsia III No. 27, Jakarta. Pada bulan Agustus 1995, Kantor Pusat Bank BHI berpindah lokasi ke Grand Boutique Centre Blok B No. 3-4, Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Utara 14430 dari yang sebelumnya di Jl. Pinangsia III No. 27, Jakarta.

Tahun 1997 merupakan awal keterpurukan dunia perbankan dan usaha dimana wabah krisis moneter yang melanda negeri ini menyebabkan 16 bank terpaksa harus dilikudasi, namun lain halnya dengan Bank Harda International yang terus melangkah. Setelah melewati masa krisis ekonomi Asia pada tahun 1998, maka Bank BHI melakukan konsolidasi dan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian sejak tahun 2000 dengan berfokus kepada pengembangan pembiayaan UKM.

Hal tersebut terwujud dengan berhasilnya Bank BHI mendapatkan Info Bank Award pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan Golden Trophy pada tahun 2005 sebagai Bank Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan selama lima tahun berturut-turut. Pada tanggal 11 September 2002, Bank BHI mulai berani melebarkan kembali sayapnya dengan membuka Cabang Penuh di luar kota Jakarta, yakni di Surabaya. Kemudian disusul pembukaan Cabang Bandung pada tanggal 4 Juli 2003, Cabang Solo pada tanggal 24 Maret 2004, dan Cabang Pontianak pada tanggal 16 Juni 2004.

Tahun 2014 Bank BHI kembali menunjukkan kinerja yang semakin baik hingga Infobank kembali menyematkan predikat sebagai bank sangat bagus. Tahun 2015, Bank BHI melakukan Penawaran Saham Perdana (IPO) kepada masyarakat sebanyak 800.000.000 lembar saham. Dari waktu ke waktu Bank BHI terus melakukan penyempurnaan baik dalam sistem operasional perbankan maupun

kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mewujudkan Bank BHI sebagai SAHABAT BISNIS TERPERCAYA.

9. PT. Bank Ina Perdana (BINA)

Pada tanggal 9 Februari 1990, PT. Bank Ina Perdana Tbk (“Bank Ina”) berdiri dengan nama PT Bank Ina berdasarkan akta no.3 Notaris Winnie Hadiprodjo, SH pengganti Notaris Kartini Muljadi, SH untuk kemudian mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman dengan surat No. C2-3639HT.01.01.Th. 90 tanggal 23 Juni 1990. Tahun berikutnya Bank Ina mendapatkan izin operasi sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 524/KMK.013/1991, tepatnya pada tanggal 3 Juni 1991.

Pada awal tahun 2014 Bank Ina menjadi Perusahaan Terbuka setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana (Initialy Public Offering) pada tanggal 16 Januari 2014, serta pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode “BINA”, dan status bank menjadi Tbk.

10. PT. Bank Jasa Jakarta (BJJ)

Sejarah Bank Jasa Jakarta bermula dari sebuah Bank Pasar yang didirikan pada tahun 1971 dengan nama PT Bank Pasar Warga Grogol berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1975 diubah namanya menjadi PT Bank Pasar Warga Gembira dan pada tahun 1976 menjadi PT Bank Pasar Jasa Jakarta. Sejalan dengan PAKTO 88 yang memberikan kemudahan bagi bank-bank untuk meningkatkan status usahanya, maka pada tahun 1989 PT Bank Pasar Jasa Jakarta berubah status menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Jasa Jakarta. Sampai saat ini Bank Jasa Jakarta telah melayani nasabah dengan menawarkan berbagai varian produk perbankan dan finansial seperti produk simpanan (tabungan, deposito, dan giro), produk pinjaman (pinjaman kendaraan, pinjaman usaha, dan pinjaman rumah), serta layanan lainnya seperti EDC, money changer, pembayaran payroll, serta jaringan ATM.

11. PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi/ SEA Bank (BKE)

PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi (Bank BKE) didirikan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 199. Mulai melaksanakan kegiatan perbankan pada tanggal 27 Februari 1992 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 256/KMK.013/1992 tanggal 21 Februari 1992. Di tahun 2020 Tumbuh dengan aset sebesar Rp3.469 miliar, 12 kantor layanan, dan lebih dari 300 pegawai.

Pada tahun 2021 Resmi berubah nama menjadi PT. Bank SeaBank Indonesia (SeaBank) berdasarkan Surat Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-12/PB.1/2021 tanggal 10 Februari 2021.

Melakukan peluncuran pertama digital banking.

12. PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk/ Bank Banten (BEKS)

Pada saat didirikan, Perseroan bernama “PT Executive International Bank” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No.34 tanggal 11 September 1992, dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 26 Desember 1992, Tambahan Nomor 6651. Perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Umum di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank di Jakarta.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi “PT Bank Eksekutif Internasional” sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor 8331.

Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UU No.40/2007 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Nomor 28 tanggal 22 Desember 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan Nomor 17003.

Nama Perseroan diubah menjadi “PT Bank Pundi Indonesia, Tbk” sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Nomor 104 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 66 tanggal 19 Agustus 2011, Tambahan Nomor 25088.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia, Tbk Nomor 157 tanggal 30 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0952563 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU- 3535156.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2016 Nomor 21, Tambahan Nomor 581/L. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama, yaitu semula PT Bank Pundi Indonesia Tbk menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, disingkat dengan Bank Banten dimuat dalam akta Nomor 36, tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-0012108.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016.

Pada 29 Juli 2016 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan Nomor: 12/KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha

Atas Nama PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk. Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk., Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT. Banten Global Development.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor 36, tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0020993.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016.

13. PT. Bank Bisnis Internasional (BBSI)

Bank Bisnis Internasional didirikan di Bandung dengan nama Bank Ekonomi Nasional NV berdasarkan Akta Notaris Meester Tan Eng Kiam No. 76 tanggal 16 Maret 1957 yang perubahan seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Kikit Wirianti Sugata, SH No. 5 tanggal 10 Februari 1999 dan No. 23 tanggal 21 Juli 1999 serta disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-17733 HT.01.04.TH.99 tanggal 15 Oktober 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 2000, tambahan No. 1563/2000. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan non-devisa.

14. PT. Bank Bca Syariah (BBCAS)

PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") merupakan hasil konversi dari akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Pada awalnya Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank

yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Oleh karena itu Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010.

15. PT. Bank Bukopin Syariah (BBKBS)

Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin). Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971.

Kegiatan usaha Bukopin awalnya mencakup segala kegiatan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku.

Bukopin kemudian melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi

Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Pada perkembangan selanjutnya, status badan hukum Bank Bukopin kemudian berubah dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Bank Bukopin memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

Bank Bukopin terus memperkuat pelayanan dan infrastruktur untuk mengoptimalkan layanan kepada nasabah. Seluruh kantor Bank Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank Bukopin. PT Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank Syariah Bukopin (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

16. PT. Bank Panin Syariah (PNBS)

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah Bank”), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

17. PT. Bank Victoria Syariah (BVICS)

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor 31425.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai

pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Data Statistik Deskriptif

	tahun	ROA	NPL	FDR
MYOR	2015	1,24	2,71	88,62
	2016	1,39	1,66	83,38
	2017	0,81	2,23	83,37
	2018	0,73	1,32	84,88
	2019	0,25	2,85	77,93
BCAS	2015	1	0,52	91,4
	2016	1,1	0,21	90,1
	2017	1,2	0,04	88,85
	2018	1,2	0,28	89
	2019	1,2	0,26	91
	2015	-2,82	3,97	94,23

BBHI	2016	0,53	1,9	89,04
	2017	0,69	2,39	99,74
	2018	-5,06	2,44	94,19
	2019	-1,83	3,93	84,3
MAS	2015	1,6	0,1	85,75
	2016	1,76	1,02	68,02
	2017	1,63	0,77	59,91
	2018	1,67	0,56	79,82
	2019	1,28	2,94	64,95
BEKS	2015	-5,29	4,91	80,77
	2016	-9,58	4,76	83,85
	2017	-1,43	4,67	91,95
	2018	-1,57	4,92	82,86
	2019	-2,09	4,01	95,59
BBYB	2015	1,16	1,85	88,95
	2016	2,53	2,48	95,74
	2017	0,43	2,07	94,57
	2018	-2,83	9,92	107,66
	2019	0,37	1,63	94,14
NOBU	2015	0,38	0	72,53
	2016	0,52	0,01	53,02
	2017	0,48	0,05	51,57
	2018	0,42	0,44	75,35
	2019	0,52	2,08	79,1
BJJ	2015	2,36	0,06	89,41
	2016	2,74	0	85,84
	2017	2,56	0	89,63
	2018	2,51	0,15	91,81
	2019	2,25	0,13	79,65
FAMA	2015	2,41	3,41	95,69
	2016	2,34	2,05	101,39
	2017	2,26	3,54	92,92
	2018	2,6	3,98	78,35
	2019	1,67	4,42	70,01
PNBS	2015	1,14	1,94	96,43
	2016	0,37	1,86	91,99
	2017	-10,77	4,83	86,95
	2018	0,26	3,84	88,82
	2019	0,25	2,8	96,23

BTPN	2015	3,1	0,4	97
	2016	3,1	0,38	95
	2017	2,1	0,4	96,2
	2018	3	0,5	96,2
	2019	2,3	0,4	163
BVIC	2015	0,65	3,93	70,17
	2016	0,52	2,37	68,38
	2017	0,64	2,32	70,25
	2018	0,33	1,9	73,61
	2019	-0,09	4,98	74,46
BKE	2015	0,93	0,84	90,4
	2016	2,12	0,46	92,39
	2017	0,55	2,17	89,17
	2018	0,57	2,06	97,62
	2019	-3,2	2,06	93,44
BBKPS	2015	0,79	2,74	90,56
	2016	-1,12	4,66	88,18
	2017	0,02	4,18	82,44
	2018	0,02	3,65	93,4
	2019	0,04	4,05	93,48
BINA	2015	1,05	0,08	82,83
	2016	1,02	2,29	76,3
	2017	0,82	2,48	77,61
	2018	0,5	2,06	69,28
	2019	0,23	3,1	62,94
BVICS	2015	-2,36	4,85	95,29
	2016	-2,19	4,35	100,66
	2017	0,36	4,08	83,53
	2018	0,32	3,46	82,78
	2019	0,05	2,64	80,52
BBSI	2015	2,09	1,8	101
	2016	2,49	2,4	108
	2017	5,03	1,93	121
	2018	3,84	1,7	123
	2019	2,87	1,33	137,07

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Descriptive Statistics

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.482706	2.257765	88.09894	5.706000
Median	0.730000	2.070000	89.00000	5.620000
Maximum	5.030000	9.920000	163.0000	7.250000
Minimum	-10.77000	0.000000	51.57000	4.560000
Std. Dev	2.420073	1.763898	15.90821	0.917368
Observations	85	85	85	85

Sumber : Output *Eviews* 10

Berdasarkan data pada tabel 4.2 yang menyajikan hasil uji statistik deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dengan observasi sebanyak (n) 85 sampel yang berasal dari 17 Bank Umum Swasta Non Devisa selama 5 tahun periode 2015-2019. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Pada variabel (Y) ROA diperoleh nilai minimum (terendah) -10.77000 kemudian nilai maximum (tertinggi) 5.030000 selanjutnya nilai mean (rata-rata) 0.482706 serta standar deviasinya sebesar 2.420073. Hal ini berarti bahwa (Y) ROA memiliki hasil kurang baik karena standard deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih tinggi dari nilai rata- rata.
2. Pada variabel (X1) NPL diperoleh nilai minimum (terendah) 0.000000 kemudian nilai maximum (tertinggi) 9.920000 selajutnya nilai mean (rata-rata) 2.257765 serta standar deviasinya 1.763898. Hal ini berarti bahwa (X1) NPL memiliki hasil yang baik karena standard deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.
3. Pada variabel (X2) FDR diperoleh nilai minimum (terendah) 51.57000 kemudian nilai maximum (tertinggi) 163.0000 selajutnya nilai mean (rata-rata) 88.09894 serta standar deviasinya 15.90821. Hal ini berarti bahwa FDR memiliki hasil yang baik karena standard deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

4. Pada variabel (X3) Suku Bunga diperoleh nilai minimum (terendah) 4.560000 kemudian nilai maximum (tertinggi) 7.250000 selajutnya nilai mean (rata-rata) 5.706000 serta standar deviasinya 0.917368. Hal ini berarti bahwa Suku Bunga memiliki hasil yang kurang baik karena standard deviasi yang mencerminkan penyimpangan lebih tinggi dari nilai rata-rata.

4.3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Regresi data panel dapat diperoleh dengan terlebih dahulu memilih model estimasi yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Pemilihan model ini dilakukan melalui Uji chow, Uji hausman dan Uji *Ragrange Multiplier* (LM)

4.3.2.1 Uji Chow

Dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *common effect* dan *fixed effect*. Hasil uji chow dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut

Tabel 4.3

Hasil *Chow Test*

Prob-F	Keputusan	Modal Regresi
0.0004	Ho diterima	<i>Fixed Effect</i>

Sumber: Data di olah menggunakan *EViews 10*

Perhatikan nilai probabilitas (Prob.) untuk Cross-section F. Jika nilainya $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah common effect, tetapi jika $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah fixed effect.

Berdasarkan hasil uji chow yang tertera pada Tabel 4.3 menunjukkan nilai probabilitas untuk Cross-section F sebesar 0,0004 yang nilainya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model fixed effect lebih tepat dibandingkan dengan model common effect.

4.3.2.2 Uji Hausmant

Pengujian Hausman test Dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara fixed effect dan random effect

Tabel 4.4

Hasil *Hausmant Test*

Prob-F	Keputusan	Modal Regresi
1.0000	Ho diterima	<i>Random Effect</i>

Sumber: Data diolah menggunakan *Eviews 10*

Perhatikan nilai probabilitas (Prob.) cross section random jika nilainya $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah random effect, tetapi jika $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah fixed effect. Berdasarkan hasil Hausman Test yang tertera pada Tabel 4.8 menunjukkan nilai Prob. Cross-section random sebesar 1,0000 yang nilainya $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih tepat dibandingkan model fixed effect. Dari dua uji pemilihan model dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih baik daripada model fixed effect dan common effect, tanpa harus dilakukan uji selanjutnya (LM Test) (Pranyoto, 2019).

4.4 Pengujian Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah terdapat variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal dalam model regresi. Uji t mengasumsikan bahwa residual mengikuti dsitribusi normal. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini pada Tabel 4.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Normalitas

Jarque-bera	Probability	Kesimpulan
459.9313	0.131974	Terdistribusi Normal

Sumber: Data diolah menggunakan *Eviews 10*

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil pengujian normalitas diatas nilai jarque bera sebesar 459.9313 dan nilai Prob sebesar 0.131974 hasil tersebut memiliki nilai Prob lebih kecil dari taraf signifikansi ($0.131974 > 0,05$) artinya residual berdistribusi normal.

4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki hubungan linier antar variabel independen. Widarjono (2013), model regresi yang baik adalah model yang tidak memiliki hubungan linier antar variabel independen. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Multikolinieritas

	NPL	FDR	BI Rate
NPL	1.000000	0.015056	-0.083214
FDR	0.015056	1.000000	0.037798
BI Rate	-0.083214	0.037798	1.000000

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Multikolinieritas dapat di deteksi dengan melihat nilai kolerasi parsial antar variabel independen jika, nilai korelasi parsial lebih kecil dari atau sama dengan 0,85 maka tidak terjadi masalah multikolinieritas, sebaliknya jika nilai korelasi parsial lebih besar dari 0,85 maka terjadi masalah multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.6 diatas diperoleh hasil berupa nilai korelasi masing-masing variabel < 0,85 menunjukkan tidak menolak H0 atau tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan dapat, disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinieritas.

4.4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi varian dari variabel residual bersifat konstan atau tidak. Apabila dalam model regresi terdapat masalah heterokedastisitas apa akan mengakibatkan nilai varian tidak lagi minimum sehingga mengakibatkan standard error yang tidak dapat dipercaya dan hasil regresi dari model tidak dapat di pertanggung jawabkan (surplus regression) (Widarjono, 2013). Hasil dari pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas <i>Test: white</i>	
Prob. chi-square	Kesimpulan
0,9189	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas hasil penyembuhan heteroskedastisitas dengan menggunakan generate data diperoleh hasil berupa nilai probabilitas chi-square 0,1595. Nilai probabilitas chi-square lebih besar dari taraf signifikansi ($0,9189 > 0,05$), artinya tidak menolak H_0 atau tidak ada heteroskedastisitas

4.4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menurut (Ghozali, 2013) dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t - 1$ Pengujian gejala autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, apabila $DU < DW < (4 - DU)$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.8

Hasil Uji Autokorelasi

Heteroskedastisitas <i>Test: white</i>	
Durbin-Watson	Kesimpulan
2,209744	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: diolah peneliti, 2021

Dari hasil uji Durbin Watson pada tabel 4.5 diketahui nilai Durbin Watson (DW) adalah sebesar 2,209744 dengan batas atas (DU) 1,7210. Nilai (DU) $1,7210 < (DW) 2,209744$ dan $< 4 - 1,7210 = 2,279$ ($4 - DU$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan dan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian apakah positif atau negatif (Widarjono, 2013). Hasil regresi penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	t-statistic
C	1.160593	0,633537
NPL	-0,717026	-5.046131
FDR	0,015798	1,005661
BI Rate	-0,078999	-0,392706
Adjusted R- square	0,220078	
S.E. of regression	1,667949	

Sumber: diolah peneliti, 2021

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 1,160593 - 0,717026 \text{ NPL} + 0,015798 \text{ FDR} - 0,078999 \text{ Suku Bunga} + 0$$

Berdasarkan hasil persamaan di atas menunjukkan bahwa :

1. Nilai Koefisien regresi Return On Aset (ROA) akan mengalami peningkatan sebesar 1,160593 untuk 1 satuan apabila semua variabel bersifat konstan.
2. Nilai koefisien regresi Net Performing Loan (NPL) terhadap Return On Aset (ROA) sebesar -0,717026 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Net Performing Loan (NPL) sebesar 1 satuan diprediksi akan menurunkan (-) Return On Aset (ROA) sebesar -0,717026.
3. Nilai koefisien regresi Financing to Deposite Ratio (FDR) terhadap Return On Aset (ROA) 0,015798 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Financing to Deposite Ratio (FDR) sebesar 1 satuan diprediksi akan menaikkan (+) Return On Aset (ROA) sebesar 0,015798.
4. Nilai koefisien regresi Suku Bunga terhadap Return On Aset (ROA) sebesar - 0,078999 nilai ini menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Suku Bunga sebesar 1 satuan diprediksi akan menurunkan (-) Return On Aset (ROA) sebesar -0,078999.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.10

Koefisien Determinasi (R²)

Variabel	Coefficient	t-statistic
C	1.160593	0,633537
NPL	-0,717026	-5.046131
FDR	0,015798	1,005661
BI Rate	-0,078999	-0,392706
Adjusted R- square	0,220078	
S.E. of regression	1,667949	

Pada tabel 4.10 diatas menunjukkan besaran adjusted R² sebesar 0,220078 , hal ini menandakan 22% tingkat *Return On Asset* dapat dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen yaitu *Non Performing Loan*, *Financing to Deposit Ratio*, dan suku bunga. Sedangkan sisanya 80% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar variabel. Standard error of estimate (SE of regression) sebesar 1,667949, semakin kecil nilai SSE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.4.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji Statistik t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh antar masing-masing (parsial) variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan pada tingkat apabila nilai keyakinan signifikant < 95% a tingkat signifikan (0,05) maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependennya, sebaliknya jika nilai signifikan t > tingkat signifikan (0,05) maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.

Tabel 4.11

Uji t

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	1.160593	0,633537	0.5282
NPL	-0,717026	-5.046131	0.0000
FDR	0,015798	1,005661	0.3176
BI Rate	-0,078999	-0,392706	0.6956
Adjusted R- square	0,220078		
S.E. of regression	1,667949		

Sumber: Output SPSS Versi 21

Berdasarkan hasil Uji statistik t diatas diketahui bahwa :

1. Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa variabel *Non Performing Loan* (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. *Non Performing Loan* (NPL) **berpengaruh** secara signifikan terhadap profitabilitas.
2. Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa variabel *Financing to Deposite Ratio* (X2) memiliki nilai probabilitas $0,3176 > 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. *Financing to Deposite Ratio* (FDR) **tidak berpengaruh** secara signifikan terhadap profitabilitas.
3. Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa variabel Suku Bunga (X3) memiliki nilai sebesar $0.6956 > 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Suku Bunga (*BI Rate*) **tidak berpengaruh** secara signifikan terhadap profitabilitas.

Dari ketiga variabel yang dimasukkan dalam model hanya variabel *Non Performing Loan* yang berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas lain halnya dengan variabel *Financing to Deposite Ratio*, dan Suku Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini merupakan hasil studi yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Resiko Kredit (NPL), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Suku Bunga (*BI Rate*) terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

4.4.1 Pengaruh NPL terhadap Profitabilitas Perbankan

Berpengaruhnya variabel NPL terhadap ROA menandakan bahwa semakin besar perusahaan perbankan melakukan operasionalnya terutama dalam pencairan kredit berarti bertambahnya resiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya non performing loan (NPL) yang semakin besar. Selain itu juga kaitannya dengan ROA, dengan besarnya NPL perusahaan perbankan dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki resiko kredit macet yang besar dari pencairan kreditnya diharapkan dengan adanya pencairan kredit yang besar dapat menghasilkan laba yang besar pula bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan ROA perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada rata rata tingkat NPL pada salah satu BUSN Non Devisa yaitu Bank Mayora dimana rata-rata tingkat NPL setiap tahun nya mengalami kenaikan, hal ini mencerminkan semakin tinggi rasio NPL maka kualitas kredit bank semakin buruk karena jumlah kredit bermasalah semakin besar. Berdasarkan standar kriteria NPL yang baik bank dapat dikatakan aman jika kurang dari 5%. Apabila jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka akan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan karena adanya peningkatan biaya cadangan aktiva produktif.

Berdasarkan *Signalling theory*, dimana isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Pada saat tingkat NPL rendah maka saat itu juga perusahaan memberikan sinyal baik kepada para investor bahwa tingkat likuiditas perusahaan dalam status sehat atau baik dan dari sinyal baik itu juga menunjukkan bahwa prospek perusahaan sedang baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh Ponttie Prasnanugraha (2007) yang mengatakan bahwa NPL adalah rasio kredit bermasalah dengan total kredit. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung bank. Bank dengan NPL yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

4.4.2 Pengaruh FDR terhadap Profitabilitas Perbankan

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan. Hal ini berarti peningkatan kredit bermasalah akan mengurangi pendapatan yang diterima oleh Bank. Bank harus mampu melakukan pengelolaan kredit secara efektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, penyediaan dana yang dibatasi kepada pihak terkait maupun pihak bukan terkait dari modal bank (Mahardika,2020).

FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, hal ini dikarenakan kredit yang disalurkan oleh bank tidak banyak memberikan kontribusi laba karena pada tahun tahun tersebut terdapat gap yang tinggi diantara bank-bank yang beroperasi pada saat itu dalam mengucurkan kredit. Hal ini ditunjukkan oleh Bank yang memiliki nilai FDR tertinggi yaitu Bank BTPN (lihat data analisis statistik deskriptif) dengan nilai sebesar 163,00. Sesuai dengan peraturan pemerintah besarnya FDR tidak boleh melebihi 110% itu artinya bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan asalkan tidak melebihi 110%. Dari fenomena tersebut ternyata masih terdapat bank-bank yang berlebihan dalam memberikan kredit.

Secara garis besar signalling theory erat kaitanya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor, laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Pada saat tingkat FDR menurun berarti menandakan bahwa sinyal atau informasi yang diberikan perusahaan adalah sinyal negatif, dimana pada saat tingkat FDR menurun itu menyatakan bahwa tingkat likuiditas bank dalam keadaan tidak baik yang menunjukkan kurangnya kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Kondisi ini bertentangan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Basran Desfian (2005) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

4.4.3 Pengaruh Suku Bunga terhadap Profitabilitas Perbankan

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa Suku Bunga tidak mempengaruhi profitabilitas. Menurut Sudirman (2013:167) suku bunga uang merupakan suatu variabel yang menghubungkan antara pasar uang dan pasar barang. Perubahan tingkat suku bunga uang mencerminkan perubahan kondisi pasar uang dan tingkat akumulasi modal atau capital dalam perekonomian.

Laju perkembangan BI Rate dari tahun 2015 – 2019 berfluktuasi dan mengalami perubahan yang cukup signifikan pula setiap tahunnya terlebih pada tahun 2015 sampai 2019 karena Bank Indonesia mengubah kebijakan BI Rate ditahun 2016 menjadi BI 7-days Repo Rate dan membuat perkembangannya menurun dengan cukup signifikan. Dengan demikian, jika bank menaikkan suku bunga mengacu pada suku bunga yang ditetapkan BI, maka minat nasabah untuk melakukan kredit yang akan menjadi keuntungan bagi bank maka profitabilitas bank (ROA) akan turun, begitu juga sebaliknya jika bank menurunkan suku bunganya maka nasabah cenderung akan melakukan kredit yang akan menjadi keuntungan bagi pihak bank dan akan menaikkan profitabilitas bank.

Terkait dengan teori sinyal, para manajer perusahaan yang memiliki informasi yang lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut pada calon investor. Suku bunga simpanan yang tinggi tentu akan menjadi daya tarik masyarakat atau nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Sedangkan suku bunga pinjaman yang tinggi akan berdampak pada penurunan aktivitas kredit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Ayerza (2018) dimana hal ini tidak membuktikan bahwa apabila tingkat suku bunga naik maka akan mengurangi profit perbankan karena walaupun pendapatan terbesar bank adalah dari pinjaman kredit yang dimana apabila tingkat suku bunga BI naik maka suku bunga kredit semakin tinggi dan mengurangi minat masyarakat untuk melakukan pinjaman kredit, dari hasil ini dilihat

bahwa bank dapat tetap menghasilkan laba tanpa terpengaruh tingkat suku bunga yang ada, baik dari tabungan maupun deposito.

